



PERTANYAAN & MASUKAN

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI



RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI BERSAMA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI

Selasa, 25 Januari 2022

Disampaikan oleh : **Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

No Anggota : A - 129

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera Kita Untuk Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Indonesia Raya...!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran. Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ijin kami menyampaikan tanggapan, pertanyaan dan masukan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra.

1. Realisasi Anggaran KLHK TA 2021 adalah sebesar 96,61% dari anggaran sebesar Rp 7,67 triliun, yang mana nilainya lebih besar dari Rata-rata Nasional sebesar 96,25%. Tapi realisasi ini masih lebih kecil dari komitmen yang disampaikan oleh Kementerian LHK kepada Komisi IV DPR RI, untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran

Tahun 2021 sebesar 97,41%, yang menjadi salah satu kesimpulan RDP Eselon I Kementerian LHK tanggal 29 November 2021. Kami dari Fraksi Partai Gerindra minta penjelasan kendala yang dihadapi.

2. Walaupun PDB sektor kehutanan tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya karena pandemi, namun selama tahun 2021 nilai ekspor kayu olahan mengalami kenaikan cukup besar yaitu sebesar USD 3,6 miliar, dimana produk *woodchip*, *veneer* dan panel menjadi jenis dengan peningkatan produksi tertinggi. Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan berapa banyak pengusaha, industri kayu dan UMKM yang terlibat dalam kenaikan nilai ekspor tersebut dan bagaimana pertumbuhan jumlah pengusaha dari level UMKM menjadi industri yang bergerak di sektor pengolahan hasil hutan kayu.
3. Tujuan ekspor kayu olahan yang terbesar adalah ke Tiongkok, yaitu sebesar USD 3,9 milyar dan ke Amerika Serikat sebesar USD 2.4 milyar. Namun yang menjadi catatan adalah adanya keluhan bahwa SVLK (Sertifikasi Legalitas Kayu) yang belum diakui secara penuh di Eropa dan Jepang. Kami dari Fraksi Partai Gerindra agar dicari solusi sehingga SVLK bisa diterima secara penuh di Eropa dan Jepang. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin nilai produk hasil kayu olahan bisa jauh lebih meningkat, karena saat ini produsen kayu olahan di dunia, khususnya kayu dari hutan tropis jumlahnya tidak banyak.
4. Terdapat kekurangan target penanaman mangrove tahun 2021 pada BRGM, yaitu seluas 50.000 ha sehingga diperlukan Alokasi Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp 1.359.316.948.000. Dari skema pendanaan yang direncanakan, Kami dari Fraksi Partai Gerindra menolak opsi skema pinjaman sebesar \$400 juta kepada *World Bank*. Sebaiknya optimalkan APBN/APBD, dan merencanakan serta mengimplementasi skema lainnya secara cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. KLHK telah melaksanakan komitmennya yaitu dengan memindahkan Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang ditandai dengan peresmian oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI, Pimpinan KLHK beserta Pemerintah Aceh di Banda Aceh pada tanggal 16 Februari 2021. Tetapi dalam pelaksanaannya secara administrasi dan eksekusi program sampai sekarang belum maksimal dilakukan, oleh karena itu Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri LHK untuk menjelaskan secara

detail dan prinsipil kendala-kendala yang dihadapi sehingga kantor BBTNGL belum sepenuhnya beroperasi di Banda Aceh. Kami Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera memaksimalkan secara permanen operasional kantor BBTNGL di Banda Aceh.

6. KLHK, dalam hal ini KSDAE telah memfasilitasi kegiatan konsolidasi dengan berbagai stakeholder yang berkompeten di Banda Aceh pada bulan November 2021 dalam mencari format penyelesaian konflik satwa dengan manusia di Provinsi Aceh. Hal tersebut merupakan langkah konkrit yang positif dan perlu dilakukan di daerah lain di Indonesia yang juga memiliki potensi yang sama. Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta Menteri LHK agar mengalokasikan anggaran yang cukup dan signifikan serta dengan rencana aksi yang matang dalam menangani kasus-kasus konflik satwa dengan manusia tersebut, sehingga mampu diselesaikan secara permanen dan berkelanjutan dengan tetap memprioritaskan kepentingan rakyat di sekitar hutan.
7. Angka indeks kinerja perubahan iklim (Climate Change Performance Index) Indonesia tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,94 poin dari 44,65 poin pada tahun 2020. Kenaikan ini juga mengangkat peringkat Indonesia sebesar 15 peringkat, sebelumnya tahun 2020 peringkat ke-39 dari total 61 negara. Kami Fraksi Partai Gerindra Meminta penjelasan terkait kebijakan apa yang dilakukan oleh KLHK dalam mengantisipasi persoalan tersebut.
8. Melalui Kepmen LHK No SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut izin 192 unit konsesi pemanfaatan hutan seluas 3.126.439,36 hektar. Selain ini pada periode September 2015 sampai Juni 2021, KLHK juga telah mencabut izin 42 unit konsesi pemanfaatan hutan seluas 812.796,93 hektar. Terkait hal ini, Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan:
 - a. Apakah pencabutan izin ini juga termasuk menindaklanjuti putusan-putusan yang sudah inkrah? Jika belum, bagaimana Rencana Tindak Lanjutnya.
 - b. Bagaimana pengawasan dan pengamanan kawasan hutan setelah pencabutan izin-izin tersebut? Termasuk alokasi anggaran di tahun 2022. Mengingat pencabutan izin dapat menyebabkan *open access* yang diantaranya dapat menyebabkan terjadinya *illegal logging*, perambahan dan pendudukan kawasan hutan, dan kebakaran hutan serta lahan.

c. Bagaimana penyelesaian dan tindakan terhadap usaha-usaha/kegiatan-kegiatan tidak berizin/*illegal* di dalam kawasan hutan?

9. Paska ditetapkannya UU Cipta Kerja, pengelolaan Kawasan Hutan di Pulau Jawa dan Pulau Madura seluas 2.435.928 hektar yang selama ini dikelola oleh Perum. Perhutani akan dikurangi seluas 1 juta ha untuk Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dalam rangka Program Perhutanan Sosial yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah (KLHK). Terkait hal ini, Kami meminta penjelasan bagaimana Rencana Pengelolaan KHDPK tersebut dan sudah sejauh mana implementasinya. Terutama tentang keberlanjutan usaha serta pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perum Perhutani.
10. Pada tahun 2019 – 2020 menunjukkan terjadinya penurunan angka deforestasi menjadi 0,12 juta Hektar. Namun menurut Greenpeace dan Forest Watch Indonesia (FWI), data penurunan ini bukan karena usaha pemerintah tetapi karena covid-19 sehingga terjadi penurunan aktivitas industri. Disamping itu, akan terjadi kenaikan laju deforestasi karena pembangunan infrastruktur fisik di sekitar wilayah hutan dan regulasi yang mempermudah pemberian izin di kawasan hutan dimana UU Minerba, UU Omnibus Law dan lainnya yang memperlemah upaya perlindungan hutan dan lingkungan. Kami Fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait informasi tersebut dan kami minta data valid tentang data deforestasi yang mengalami penurunan.
11. Kami meminta agar BRGM mengevaluasi kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang di dalam areanya terdapat gambut. BRGM dapat memberikan tugas dengan standar yang telah ditetapkan agar perusahaan dapat memelihara ekosistem gambut di dalam atau sekitar izin lokasi atau HGU dan mencegah upaya-upaya yang bertentangan dengan tujuan pelestarian ekosistem gambut. BRGM harus fokus pada pengelolaan ekosistem gambut yang berada di luar konsesi perusahaan dan yang telah dimoratorium.
12. Kami meminta agar Dirjen PSLB3 mengevaluasi ketentuan persyaratan bantuan pembangunan tempat pengelolaan sampah seperti TPS 3R, Bank Sampah Induk, dan sebagainya terutama agar tidak hanya lahan milik pemda atau Fasos Fasum Perumahan saja yang dapat digunakan, namun lahan milik masyarakat dapat pula diusulkan sebagai lokasi pembangunan bantuan tersebut sehingga setiap daerah tidak kesulitan atau terhambat terkait lahan jika ingin mengusulkan bantuan tersebut.

13. Mengingat masih banyak kegiatan dan program KLHK di daerah, termasuk konservasi dan perlindungan mangrove, yang belum mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar hutan, maka Kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri LHK agar melaksanakan sosialisasi dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama Komisi IV DPR-RI diperbanyak pada semua level eselon 1 di KLHK.
14. Penanggulangan sampah secara nasional masih dianggap belum maksimal oleh karena itu kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Menteri LHK Republik Indonesia koncern dalam penanganan sampah secara komprehensif dan terukur, KLHK harus mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk kegiatan-kegiatan strategis dalam penanganan sampah misalnya memperbanyak “bank sampah” untuk kelompok-kelompok masyarakat yang koncern di penanganan sampah, sekaligus menciptakan rule models penanganan sampah yang mendapatkan keuntungan bagi masyarakat, sehingga menghasilkan dan berkelanjutan.
15. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan mulai terlihat. Meskipun begitu masih banyak kasus lingkungan hidup belum tersentuh. Kalangan organisasi masyarakat sipil masih melihat ada persoalan eksekusi hukuman lemah, transparansi dan mempertanyakan soal konsep keadilan restoratif dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Kekhawatiran lain, ancaman melemahnya penegakan hukum lingkungan dengan kehadiran UU Cipta Kerja. Permasalahan paling banyak terjadi di kebakaran hutan dan lahan sekitar 26%, pencemaran lingkungan 20%, perambahan hutan 16% dan beberapa pelanggaran lain. Juga ada potensi *illegal logging*, pelanggaran izin lingkungan hidup, bumping limbah B3, kerusakan lingkungan, konflik tenurial, pelanggaran izin bidang kehutanan, dan tumbuhan satwa dilindungi. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta kepada KLHK untuk melaksanakan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap kerusakan lingkungan atau kehutanan yang terjadi harus dilakukan tidak hanya bicara keadilan bagi manusia tetapi juga alam.
16. Kami dari Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan bagaimana peran Itjen dalam, melakukan pengawasan internal terhadap program-program seperti terjadinya deforestasi yang masif, kasus-kasus illegal logging dan lainnya ?

Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta Jajaran.

Demikian masukan dan pertanyaan ini kami sampaikan, besar harapan kami di tahun 2022 hutan kita memiliki peran yang penting bagi seluruh rakyat Indonesia

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI

| | |
|--|--------------------------------|
| G. Budisatrio Djiwandono | - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI |
| Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU | - Kapoksi |
| Ir. H. TA Khalid, M.M. | - Anggota |
| Dr. H. Azikin Solthan, M.Si. | - Anggota |
| Dr. Ir. Hj. Endang S Thohari M.Sc. | - Anggota |
| Hj. Renny Astuti, S.H., S.PN. | - Anggota |
| Ir. Dwita Ria Gunadi | - Anggota |